

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DI INDOENSIA

Leni Gaswira^a, Alya Nabila^b

^{ab}Universitas Samudra

lenigaswira.2002@gmail.com, alyanabilaabel@gmail.com

Correspondence		
Email: lenigaswira.2002@gmail.com, alyanabilaabel@gmail.com	No. Telp:	
Submitted: 12 December 2023	Accepted: 21 December 2023	Published: 22 December 2023

ABSTRACT

This research aims to determine the application of Sharia accounting principles in Indonesia as well as the regulations governing the implementation of Sharia accounting activities, because Indonesia is a country with a Muslim majority population, so accounting activities in Indonesia, both banking and non-banking activities use Sharia accounting principles.

Keywords: Accounting, Sharia Accounting, Theory, Descriptive Analysis

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Prinsip akuntansi syariah diindonesia serta peraturan yang mengatur penerapan kegiatan Akuntansi Syariah, karena Indonesia merupakan salah satu Negara dengan penduduk mayoritas muslim, sehingga kegiatan akuntansi diindonesia baik kegiatan perbankan maupun non perbankan menggunakan prinsip akuntansi Syariah.

Kata Kunci : Akuntansi, Akuntansi Syariah, Teori, Analisis Deskriptif

INTRODUCTION

Di era pertumbuhan ekonomi global saat ini, peningkatan praktik akuntansi Syariah dikalangan masyarakat muslim juga semakin meningkat. Hal ini bertujuan untuk membentuk perekonomian terutama pencatatan keuangan agar sejalan dengan nilai-nilai Syariah yang pada akhirnya digunakan untuk memastikan bahwa praktik akuntansi mencerminkan prinsip-prinsip etis keuangan yang sejalan dengan keyakinan agama islam. Ekonomi islam dibentuk dengan fokus pada tujuan-tujuan kultural dan politis, tak mesti memenuhi standard ilmiah yang ketat dalam kohesi, ketelitian, atau realisme. Tujuannya lebih kearah perbedaan para digmain telektual yang ada, sehingga sumbangan dalam bidang ekonomi islam biasanya dimulai dengan mengenanali ciri-ciri khusus yang melekat pada ekonomi islam (Kuran, 1995).

Di Inonesia, terdapat dua jenis akuntansi utama, yakni akuntansi konvensional dan akuntansi Syariah. Akuntansi Syariah yang saat ini umumnya terlihat di lembaga-lembaga Syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya yang berbasis Syariah. Namun peran yang dimainkan oleh akuntansi Syariah masih menjadi perdebatan tentang keberadaannya, apakah mutlak diperlukan dalam dunia akuntansi. Karena hakikatnya fokus pada pencatatan data yang sering digunakan adalah akuntansi konvensional, untuk penggunaan akuntansi Syariah pada kepentingan individu dalam masyarakat sering kali tidak terlalu umum. Hal ini disebabkan karena hanya sedikit entitas yang benar-benar menerapkannya (Mafikah et al., 2023).

Akuntansi Syariah bertujuan menciptakan budaya bisnis yang berakar pada aspek kemanusiaan, pembebasan, dan teologi. Melalui akuntansi Syariah, struktur sosial yang terbentuk mencerminkan konsep kesatuan dan letaan kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt (Pratama et al., 2017). Penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam



akuntansi menjadikan hal ini sebuah tantangan tersendiri didalam dunia akuntansi. Ini disebabkan oleh prinsip-prinsip akuntansi Syariah berbeda dengan prinsip akuntansi konvensional. Oleh karena itu, diperlukannya analisis yang mendalam agar dapat memahami bagaimana teori akuntansi Syariah ini diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang ada.

Adanya dukungan dari regulasi pemerintah terkait penerapan praktek akuntansi Syariah di Indonesia yang melalui Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI), Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK Syariah) dan pendirian Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAK) menjadi factor untuk memperkuat keberadaan akuntansi Syariah dalam praktik yang lebih luas di Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat landasan teori yang mendukung perkembangan praktik akuntansi syariah, perkembangan kebijakannya dan regulasi yang terkait.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang terperinci tentang penerapan akuntansi Syariah berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dengan studi literature ditinjau melalui buku, jurnal, dan artikel terkait akuntansi Syariah, praktek akuntansi Syariah, dan prinsip-prinsip Syariah. Sehingga dapat menambah wawasan mengenai praktik-pratik dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang ada di perekonomian dan keuangan masyarakat Indonesia.

LITERATURE REVIEW

Definisi Akuntansi Syariah

Asal usul kata “akuntansi” berasal dari Bahasa Inggris yaitu “accounting” yang dalam Bahasa Arab disebut “muhasabah”. Secara etimologi, akuntansi Syariah terbentuk dari dua istilah yaitu “akuntansi” dan “Syariah”. Sehingga secara makna, istilah-istilah tersebut merujuk pada proses menghitung, menimbang, melakukan kalkulasi, mencatat data dengan teliti, atau menghitung, yang semuanya mengacu pada perhitungan yang seksama dan harus dicatat dalam pembukuan. Akuntansi Syariah merupakan teori akuntansi yang bertujuan untuk secara tepat merekam dan mempertanggung jawabkan aktivitas manusia dalam mengelola kekayaan yang dipercayakan kepada mereka, dengan memastikan bahwa setiap transaksi keuangan didasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, Hadist, dan ijmak (Maulina, 2022).

Akuntansi Syariah melibatkan cara untuk secara adil mengenali, menilai, mencatat, serta mengungkapkan hak dan kewajiban yang terjadi dari transaksi-transaksi (Pratama et al., 2017). Pada kerangka akuntansi dalam Islam, fokusnya terletak pada prinsip pertanggung jawaban yang didasarkan pada ajaran Al-Quran. Salah satu prinsip ini tercermin dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yang menekankan kewajiban bagi setiap individu beriman untuk mencatat dengan jelas setiap transaksi yang belum selesai. Tujuannya adalah agar transaksi tersebut terdokumentasi dengan rinci mengenai nilainya, waktu terjadinya, dan mudah disaksikan oleh pihak lain, sehingga dengan demikian tidak menimbulkan keraguan.

Dalam prinsip Syariah, ajaran yang terdapat dalam Al-Quran memberikan pedoman etis yang kuat untuk panduan kehidupan manusia. Sunnah, yang merupakan tindakan dan perkataan Nabi Muhammad SAW yang di ilhami oleh wahyu, juga merupakan bagian integral dari panduan ini. Meskipun Al-Quran ditunjukkan kepada umat Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, prinsip-prinsipnya memiliki relevansi universal. Sebagai solusi terhadap tantangan ekonomi masa kini, prinsip-prinsip Syariah menawarkan landasan yang kuat. Dampaknya, tidak hanya masyarakat Muslim, tetapi juga masyarakat non-Muslim tertarik untuk melibatkan diri dalam ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam.

Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

Menurut Yusuf Q et al (2019) prinsip-prinsip Akuntansi syariah sebagai berikut :

1. Prinsip pengungkapan penuh (Full Disclosure Principle) adalah prinsip yang menekankan bahwa pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang lengkap dan jelas untuk menghindari interpretasi yang salah. Tujuannya adalah memenuhi tanggungjawab kepada masyarakat dan pihak yang terlibat serta menegakkan kejujuran. Dalam konteks akuntansi Syariah, hal ini juga berkaitan dengan ketaatan pada nilai-nilai kebenaran yang diatur oleh agama, seperti yang dianjurkan untuk mencatat dengan tepat dan jujur.
2. Prinsip keseragaman (Consistency Principle) adalah prinsip akuntansi yang digunakan harus konsisten dan tetap sama dari waktu ke waktu untuk mengukur kondisi dan aktivitas entitas. Hal ini penting dalam konteks akuntansi Syariah karena menekankan konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama. Fokus pada keseragaman prinsip-prinsip yang mendukung nilai-nilai agama menandakan penolakan terhadap prinsip-prinsip yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.
3. Prinsip Dasar Akrua (Accrual Basis Principle) adalah prinsip yang mengacu pada pengakuan pendapatan dan kewajiban pada saat terjadinya, bukan saat diterima. Dalam konteks akuntansi Syariah, hal ini juga mempengaruhi cara perusahaan mengenali pendapatan dan kewajiban. Penekanan pada metode akrual mengimplikasikan pengakuan yang jelas terhadap hasil dan kewajiban sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terlepas dari transaksi tunai yang terjadi di masa depan.

Menurut Muljono (2019) seperti dikutip dalam Maulina (2022), prinsip-prinsip akuntansi Syariah adalah sebagai berikut :

1. Prinsip sesuai syariah dengan menilai transaksi apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, sehingga membedakan antara yang diizinkan dan yang tidak diizinkan.
2. Prinsip kesatuan yaitu dengan ada pemisahan yang jelas antara perusahaan dan individu terkait, menegaskan bahwa perusahaan syariah adalah entitas yang terpisah dari kepentingan personal.
3. Prinsip berkesinambungan mengartikan bahwa perusahaan dianggap akan terus beroperasi, yang tercermin dalam perubahan-perubahan laporan keuangan dari waktu ke waktu.
4. Prinsip pertukaran harga objektif dengan setiap transaksi keuangan harus didasarkan pada nilai moneter yang objektif, mencerminkan harga yang adil dan sesuai dengan pasar saat itu.
5. Prinsip Konsisten merupakan keberlanjutan metode yang digunakan dalam pencatatan keuangan yang tidak boleh berubah-ubah.
6. Prinsip konservatif mencerminkan pengakuan potensi kerugian dengan membentuk cadangan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul di masa depan, meskipun laba yang belum direalisasi tidak diakui secara langsung.

Menurut Sahrullah et al (2022), prinsip akuntansi Syariah berdasarkan surah Al-Baqorah ayat 282, yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip pertanggung jawaban dalam akuntansi mengarah pada penggunaan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Tetapi pada level lain, surah Al-Baqorah ayat 282 menegaskan bahwa setiap individu yang terlibat dalam bisnis harus bertanggung jawab atas tindakannya kepada yang lain.
2. Prinsip keadilan, dalam konteks akuntansi menyoroti pentingnya pencatatan yang jujur dan tidak memihak kepada pihak manapun, sebagaimana yang ditegaskan dalam surah Al-Baqorah ayat 282.

3. Prinsip kebenaran dalam akuntansi berkaitan erat dengan pengakuan dan pengukuran keuangan. Untuk memastikan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi ekonomi, nilai kebenaran menjadil andasan yang krusial dan tak terpisahkan dari prinsip keadilan itu sendiri.

METHODS

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan praktek akuntansi Syariah di Indonesia yang melalui Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI), Peraturan Standar Akuntansi Syariah (PSAK Syariah) dan pendirian Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAK) menjadi faktor untuk memperkuat keberadaan akuntansi Syariah dalam praktik di Indoensia, seperti diperbankkan, Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Literatur dengan penguraian data menggunakan deskriptif dengan landasan teori diambil dari artikel dan jurnal penelitian terdahulu.

RESULTS AND DISCUSSION

Results

Akuntansi Syariah sebenarnya memiliki pemahaman yang sama seperti akuntansi konvensional namun yang membedakannya hanyalah segala praktik itu dilakukan dalam standar dan landasan syariah, dalam akuntansi syariah juga mengenal istilah-istilah yang berbeda dengan akuntansi konvensional seperti, Akad, Bai' al Dayn (pengajuan Kredit), Hiwalah (pemindahan Piutang), Ijarah (sewa), Mudharabah, dll.

Akuntansi syariah di Indoensia, dari semenjak tahun kemunculannya yaitu seiring dengan berdirinya lembaga keuangan syariah yang dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sampai dengan peristiwa dilahirkannya pernyataan standar akuntansi syariah (PSAKS) terakhir yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2016, telah mengalami perkembangan yang cepat dalam mengadopsi setiap perubahan dalam lingkungan bisnis syariah yang dihadapi masyarakat Indonesia. Perubahan cepat dalam lingkungan bisnis syariah memerlukan suatu teori akuntansi syariah yang baik pula. Teori akuntansi syariah diperlukan oleh para pelaku akuntansi karena merupakan ilmu untuk menerapkan akuntansi syariah. Beberapa cendekiawan dari Indonesia seperti Sofyan Syafri Harahap, Iwan Triyuwono, Aji Dedi Mulawarman serta IAI telah merumuskan suatu prinsip akuntansi syariah yang secara fenomenal menurut Mulawarman (2009) terbagi ke dalam dua aliran besar yaitu idealis yang bersifat deduktif yang diwakili oleh Iwan Triyuwono beserta Aji Dedi Mulawarman dan pragmatis yang bersifat induktif yang diwakili oleh Sofyan Sjafrie Harahap dan IAI.

Prinsip Akuntansi Syariah

Berdasarkan Surat Al Baqarah 282:

1. Pertanggungjawaban (Accountability) Prinsip pertanggungjawaban (accountability), merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Sang Khalik mulai dari alam kandungan.
2. Prinsip Keadilan Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp. 265 juta, maka akuntan (perusahaan) harus mencatat dengan jumlah yang sama dan sesuai dengan nominal transaksi. Secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dengan kata lain tidak ada window dressing dalam praktik



akuntansi perusahaan.

3. Prinsip Kebenaran Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Standar Akuntansi Syariah (PSAK Syariah)

PSAK Syariah Terhitung Sejak 1992-2002 atau 10 tahun lembaga keuangan baik bank syariah maupun entitas syariah yang lain tidak memiliki PSAK khusus yang mengatur transaksi dan kegiatan berbasis syariah. PSAK 59 sebagai produk pertama Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) – Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk entitas syariah dan merupakan awal dari pengakuan dan eksistensi keberadaan akuntansi syariah di Indonesia. PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah dan kerangka dasar penyusunan laporan keuangan Bank 42 Purnama Putra Syariah ini disahkan tanggal 1 Mei 2002 dan yang resmi berlaku mulai 1 Januari 2003. Adapun Kronologis Penyusunan PSAK Perbankan Syariah di jelaskan (Muhammad, 2008) oleh sebagai berikut :

1. Januari – Juli 1999, masyarakat mulai memberi usulan mengenai standar akuntansi untuk bank syariah.
2. Juli 1999, usulan masuk agenda dewan konsultan SAK.
3. Agustus 1999, dibentuk tim penyusunan pernyataan SAK bank syariah.
4. Desember 2000, tim penyusunan menyelesaikan konsep exposure draf.
5. 1 Juli 2001, exposure draft disahkan mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syariah.
6. 1 Mei 2002, pengesahan kerangka dasar penyusunan dan penyusunan dan pengajian laporan keuangan Bank Syariah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syariah.
7. 1 Januari 2003, mulai berlaku kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah dan PSAK Akuntansi Syariah.

PSAK 59 dikhususkan untuk kegiatan transaksi syariah hanya di sektor perbankan syariah, ini sangat ironis karena ketika itu sudah mulai menjamur entitas syariah selain dari perbankan syariah, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah. Maka seiring tuntutan akan kebutuhan akuntansi untuk entitas syariah yang lain maka Komite Akuntansi Syariah Dewan Standar Akuntansi Keuangan (KAS DSAK) menerbitkan enam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bagi seluruh lembaga keuangan syariah (LKS) yang disahkan tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008 atau pembukuan tahun yang berakhir tahun 2008. (Harahap, Wiroso, & Yusuf, 2010) Seiring berjalannya waktu, entitas syariah mulai bermunculan di Indonesia, tidak hanya bank tapi juga lembaga keuangan lainnya seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, leasing syariah dan lainnya. Tentunya entitas non bank tidak relevan menggunakan Standar Akuntansi yang mengatur tentang bank syariah. Dengan demikian, IAI, MUI, para akademisi dan para praktisi berkumpul untuk merumuskan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah). Maka PSAK No. 59 pada paragraf-paragraf tertentu dicabut dan digantikan dengan PSAK No. 100 hingga PSAK No. 110. Berikut ini adalah penjelasan dari isi hanya PSAK syariah 101- 109

1. PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah
2. PSAK 102 : Akuntansi Murabahah
3. PSAK 103 : Akuntansi Salam
4. PSAK 104 : Akuntansi Istishna'

5. PSAK 105 : Akuntansi Mudharabah
6. PSAK 106 : Akuntansi Musyarakah
7. PSAK 107 : Akuntansi Ijarah
8. PSAK 108 : Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
9. PSAK 109 : Akuntansi Zakat dan Infak/Sadaqah

Prinsip Modal Pokok dalam Akuntansi Islam

Diantara tujuan syariat Islam ialah menjaga dan mengembangkannya melalui jalur-jalur yang syar'i, untuk merealisasikan fungsinya dalam kehidupan perekonomian serta membantu memakmurkan bumi dan pengabdian kepada Allah SWT. Sumber-sumber hukum Islam telah mencukupi kaidah-kaidah yang mengatur pemeliharaan terhadap modal pokok (kapital). Prinsip-Prinsip Akuntansi pada Modal Pokok yang terpenting diantaranya sebagai berikut.

1. Tamwil dan Syumul (Mengandung Nilai dan Universal) modal itu harus dapat memberikan nilai, yaitu mempunyai nilai tukar di pasar bebas. Bisa saja, modal beda dalam naungan sebuah perusahaan dalam bentuk uang, barang milik, atau barang dagangan selama harta itu masih bisa dinilai dengan uang oleh pakar-pakar yang ahli di bidang itu serta disepakati oleh mitra usaha.
2. Mutaqawwim (Bernilai) Modal itu harus bernilai, artinya dapat dimanfaatkan secara syar'i. Jadi, harta-harta yang tidak mengandung nilai tidak termasuk dalam wilayah akuntansi yang sedang dibicarakan, seperti khamar, daging babi, dan alat-alat perjudian.
3. Penguasaan dan Pemilikan yang Berharga Mal atau harta itu harus dimiliki secara sempurna dan dikuasainya sehingga ia dapat memanfaatkannya secara bebas dalam bermuamalah atau bertransaksi. Sebagai contoh, tidak boleh bagi seseorang untuk memulai dengan pihak lain kerjasama dalam uang dan pekerjaan dengan janji membayarkan uang tersebut dikemudian hari atau uang itu masih bersifat utang (dalam jaminan), seperti yang ditegaskan oleh ulama fiqih dalam fiqih syarikhah.
4. Keselamatan dan Keutuhan Ra'sul-maal Sistem akuntansi Islam menekankan pemeliharaan terhadap kapital yang hakiki, seperti yang tergambar dalam sabda Rasul sebagai Penerapan Praktek dan Teori Akuntansi 90 berikut. "Seorang mukmin itu bagaikan seorang pedagang; dia tidak akan menerima laba sebelum dia mendapatkan ra'sul-maalnya (modal). Demikian juga, seorang mukmin tidak akan mendapatkan amalan-amalan sunnahnya sebelum ia menerima amalan-amalan wajibnya." (HR Bukhari dan Muslim). Jadi, kalau modal belum dipisahkan dan keuntungan telah dibagi, itu dianggap telah membalikan sebagai modal kepada sipemilik saham. Hal inilah yang banyak menimbulkan masalah dalam perusahaan-perusahaan.

Prinsip Perhitungan Laba dalam Akuntansi Islam

Diantara tujuan dagang yang terpenting ialah meraih laba, yang merupakan cerminan pertumbuhan harta. Laba ini muncul dari proses pemutaran modal dan pengopersiannya dalam aksi-aksi dagang dan moneter. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta/modal yang melarang menyimpannya sehingga tidak habis sdimakan zakat, sehingga harta itu dapat merealisasikan peranannya dalam aktivitas ekonomi. Di dalam Islam, laba mempunyai pengertian khusus sebagaimana telah dijelaskan oleh ulama-ulama salaf dan khalaf. Dalam bahasa Arab, laba berarti pertumbuhan dalam dagang.

Discussion

Akuntansi Syariah pada dasarnya memiliki teori yang sama dengan Akuntansi Konvensional namun didalam akuntansi syariah berisi teori akuntansi yang sesuai dengan

yang diajarkan didalam islam dan Al-Qur'an, Di Indonesia Akuntansi Syariah pertama kali muncul berdirinya lembaga keuangan syariah yang dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sampai dengan peristiwa dilahirkannya pernyataan standar akuntansi syariah (PSAKS) terakhir yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2016, dan Memiliki Peraturan Standar Akuntansi Syariah (PSAK Syariah) yang mengatur segala aktivitas Akuntansi Syariah baik perbankan maupun non perbankan.

CONCLUSION

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat menambah pemahaman pembaca terkait penerapan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia, Untuk penelitian selanjutnya peneliti dapat meneliti PSAK Syariah yang ada di Indonesia seberapa persis dijalankannya dan seberapa persis penerapan Akuntansi syariah di Indonesia berdasarkan PSAK yang ada.

REFERENCES

- Kuran, T. (1995). *Islamic Economics and the Islamic Subeconomy*. 9(4), 155–173.
- Mafikah, A. D., Sari, S. I. N., Handika, W., Hikam, J. L., & Lathifah, E. (2023). Perspektif Akuntansi Syariah: Teori Dan Penerapannya. *Journal Economics Technology And Entrepreneur*, 02(01), 387–395.
- Maulina, I. (2022). Sejarah Lahirnya Akuntansi Syariah. *Jurnal Investasi Islam*, 7(1), 1–13. <http://journal.iainlangsa.ac.id/index>.
- Pratama, B. C., Setiawiani, I. G., Fatimah, S., & Felani, H. (2017). *PENERAPAN PRAKTEK DAN TEORI AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH*. 13, 83–91.
- Sahrullah, S., Abubakar, A., & ... (2022). Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282. *SEIKO: Journal of ...*, 5(c), 325–336. <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/2024%0Ahttps://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/download/2024/1331>
- Yusuf Q, M., M. Anwar, S., & Sunarti, S. (2019). Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan Tahun 2015 Pada Pt. Bank Mandiri Syariahkota Palopo. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1), 13–24. <https://doi.org/10.35906/je001.v7i1.318>